



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI

Jln. Jendral Sudirman Salido, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,
Telepon / Faksimile (0756) 22211,
Laman <https://ivjuraikec.pesisirselatankab.go.id> Pos-el ivjuraikec@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI
NOMOR 400.10.2/23/CIVJ/2024

TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI PAINAN
KECAMATAN IV JURAI

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJAPEMERINTAHAN NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2024

- Membaca : 1. Surat Wali Nagari Painan Kecamatan IV Jurai Nomor :900/14/WNP/III/2024 tanggal Empat Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Nagari Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja /APBNagari Tahun Anggaran 2024;
- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APBNagari adalah rencana keuangan tahunan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama antara Wali Nagari dan Bamus Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari;
- b. bahwa pendelegasian kewenangan melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari kepada Camat atau sebutan lainnya, selanjutnya Camat membentuk Tim Evaluasi;
- c. bahwa Pemerintah Kecamatan dengan fungsinya untuk membina dan mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Desa/Nagari;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat IV Jurai tentang Tim Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang

- Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1956 Nomor 25), Jis Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang- Undang Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Desa Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015, Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88

- tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024
 14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 9 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tentang Nagari, (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 02);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, (Berita Daerah

- Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 Nomor 62);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 Nomor 69);
 18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor -);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 Nomor ...);
 20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 Nomor -);
 21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023 (Lembaran/Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 Nomor);
 22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2024;
 23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 133 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah Retribusi Daerah setiap Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024, (Lembaran/Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 Nomor 14);
 24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun 2024;
 25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari Serta

Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari, (Lembaran/Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 Nomor 15);

26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2024
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tentang Standar Harga Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Painan Tahun 2024;
- KEDUA** : Wali Nagari bersama Bamus Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam hal Wali Nagari dan Bamus Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Nagari, maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.
- KEEMPAT** : Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/mutlak terhadap APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi.
- KELIMA** : Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadinya permasalahan hukum dikemudian hari.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SALIDO

Pada tanggal : 19 Maret 2024

CAMAT IV JURAI



FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP.

Penata Tk.I/ (III/d)

Nip. 198506122004122001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Bagian Hukum dan Ham Setda Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Ketua Bamus Nagari Painan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI
NOMOR 400.10.2/23/CIVJ/2024
TANGGAL : 19 Maret 2024

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI PAINAN
KECAMATAN IV JURAI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN
ANGGARAN 2024

A. UMUM

1. Alokasi Anggaran dalam Rancangan Peraturan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 yaitu :

I. Pendapatan sebesar **Rp. 1.634.270.266,00.-** dengan rincian :

1) Pendapatan Asli Nagari	Rp.	0,00
2) Pendapatan Transfer	Rp.	1.632.770.266,00
3) Lain-lain Pendapatan Nagari Yang Sah	Rp.	1.500.000,00

II. Belanja sebesar **Rp. 1.694.979.545,48.-** dengan rincian :

1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Rp.	660.307.385,48
2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari	Rp.	441.617.160,00
3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari	Rp.	164.261.500,00
4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Rp.	274.793.500
5) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak Nagari	Rp.	154.000.000,00

III. Pembiayaan sebesar **Rp. 60.709.279,48.-** dengan rincian :

1) Penerimaan Pembiayaan	Rp.	60.709.279,48
2) Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	100.000.000,00

2. Rancangan Peraturan Nagari Painan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Painan Tahun Anggaran 2024, yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Melalui Camat IV Jurai sudah ditandatangani oleh Wali Nagari Bersama BAMUS

Nagari untuk dilaksanakan Evaluasi oleh Tim Kecamatan yang mendapatkan Limpahan Kewenangan dari Bupati Pesisir Selatan.

3. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Nagari Painan Tahun 2024 agar mencantumkan Pengalokasian Anggaran Belanja Nagari yang mendukung Program Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Prioritas Penggunaan Dana Nagari sesuai amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016.

B. PENDAPATAN

1. Pendapatan Nagari yang dianggarkan dalam APBNagari merupakan :
 - a. Perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
 - b. Seluruh Pendapatan Nagari dianggarkan secara bruto dalam APB Nagari, yaitu bahwa jumlah pendapatan Nagari yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut.
 - c. Penganggaran Pendapatan Asli Nagari merupakan Target minimal yang akan diterima satu tahun berjalan.
2. Pada Pendapatan Nagari tidak dianggarkan Pendapatan Asli Nagari karena tidak adanya dasar hukum yang mengikat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, antara lain menyatakan bahwa penganggaran pendapatan nagari yang bersumber dari Pendapatan Asli Nagari (PAN) memperhatikan salah satunya yaitu mencantumkan dasar hukum pungutan nagari berkenaan dan dilarang mengggarkan pendapatan pungutan nagari yang belum ada dasar hukumnya meskipun ada potensinya.
3. Pada Rancangan Peraturan Nagari Painan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp. 5.430.625,00.- dan sebesar Rp. 3.903.081,00.- Bagi hasil retribusi daerah sedangkan Rp. 37.908.560,00.- adalah Bagi hasil PBB P2 yang sudah sesuai berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 133 tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Tahun Anggaran 2024.
4. Pada Rancangan Peraturan Nagari Painan tentang APB Nagari Painan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan pendapatan yang berasal dari Dana Desa /DD sebesar Rp.

- 1.079.723.000,00 berpedoman kepada Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.
5. Pada Rancangan Peraturan Nagari Painan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan pendapatan yang berasal dari Alokasi Dana Nagari/ADN sebesar Rp. 505.805.000,00.- sudah sesuai berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun 2024 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
 6. Anggaran Pendapatan Lain-lain sebesar Rp. 1.500.000,00.- dengan rincian Pendapatan Bunga Bank.
- C. Belanja Nagari harus digunakan untuk pelaksanaan kewenangan Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari, dan penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak nagari, berdasarkan prakarsa masyarakat, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Propivinsi, kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Propinsi, hak asal usul, dan adat istiadat Nagari serta kewenangan lokal berskala Nagari.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, menyatakan bahwa Alokasi Dana kepada Nagari adalah untuk membiayai Program dan Kegiatan yang telah dituangkan dalam RPJM Nagari dan RKP Nagari dibahas dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari.

Mempedomani Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, antara lain menyatakan bahwa dalam rangka optimalisasi penggunaan Bantuan Keuangan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten tahun-tahun sebelumnya, yang belum dimanfaatkan dan/atau masih ada di rekening kas nagari sebagai SILPA Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Nagari harus menganggarkan kembali dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan peruntukan yang sudah disepakati bersama BAMUS Nagari pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas diminta kepada Nagari untuk menganggarkan kembali bantuan keuangan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten tahun-tahun sebelumnya, yang belum dimanfaatkan dan/atau masih ada di rekening kas nagari sebagai SiLPA Tahun Anggaran 2023 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2024

sesuai dengan peruntukan yang sudah disepakati bersama BAMUS Nagari pada tahun sebelumnya.

Dalam rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2024, pengalokasian dana kegiatan yang bersumber dari APBN belum sepenuhnya dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang dapat didanai dari dana APBNagari sesuai yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari serta Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2024. Adapun prinsip penggunaan Dana oleh Nagari untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala nagari yang diatur dan diurus oleh nagari, Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Belanja Bidang Pembangunan Nagari, Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari, dan Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Nagari sebagai berikut :

I. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari tersebut antara lain :

A. Pada Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Nagari :

1. Penyediaan Penghasilan Tetap Wali Nagari sebesar **Rp. 24.000.000,00.-**
 2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari sebesar Rp. 297.300.000,00 yang terdiri dari :
 3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Wali dan Perangkat Nagari sebesar Rp. **15.316.560,00**
 4. Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari Rp. 63.900.018,89
 5. Penyediaan Tunjangan Bamus Nagari Rp. 68.700.000,00
 6. Penyediaan Operasional Bamus Rp. 9.336.000,00
 7. Belanja Pegawai Rp. 1.800.000,00
 8. Belanja Barang Dan Jasa Rp. 7.536.000,00
- B. Pada Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Nagari Rp. 37.914.000,00**
1. Penyediaan Sarana Aset Tetap Perkantoran Rp. 6.350.000,00
 2. Pemeliharaan Gedung/Sapras Kantor Rp. 31.564.000,00

C. Pada Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan :		
	4.743.610,00	
1.	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Nagari	Rp. 2.675.500,00
	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Rp. 2.068.110,00
D. Pada Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan rincian sebagai berikut:		Rp. 55.993.000,00
1.	Penyelenggaraan Musyawarah Nagari Lainnya (Musnag, rembug kampung non reguler) :	Rp. 9.415.000,00
2.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Nagari (RPJMNagari/RkpNagari)	Rp. 3.805.000,00
3.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa, APBDesa Perubahan, LPJ dll :	Rp. 3.130.000,00
4.	Koordinasi Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa	Rp. 2.600.000,00
5.	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 2.600.000,00
E. Sub Bidan Pertanahan		
	Administrasi Pajak Bumi Bangunan (PBB)	Rp. 17.315.000,00
II. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari :		
A. Pada Sub Bidang Pendidikan		
1.	Penyelenggaraan PAUD dan TPQ	Rp. 204.830.000,00
B. Sub Bidang Kesehatan :		Rp. 111.240.000,00
	Belanja Barang Dan Jasa	Rp. 70.080.000,00
5.	Penyelenggaraan Operasional Bersumber DD	Rp. 104.000.000,00
B	Penyediaan Sarana Prasarana Nagari	Rp. 17.250.000,00
D. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		Rp. 8.400.000,00
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Rp. 22.705.000,00
	Bidan Pertanahan :	Rp. 24.930.806,59
	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan	
II BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		
A Sub Bidang Pendidikan		Rp. 231.555.160,00

- Honor Guru Paud/TK/TPA/TPQ		195.920.000,00
- Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin Berprestasi		35.602.160,00
B Sub Bidang Kesehatan	Rp.	119.725.000,00
- Penyelenggara Pos Kesehatan Desa	Rp.	12.000.000,00
- Penyelenggara Posyandu	Rp.	77.640.000,00
- Penyelenggara Desa Siaga	Rp.	10.500.000,00
- Bina Keluarga Balita (BKB)	Rp.	19.585.000,00
C Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Rp	17.500.000,00
D Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Rp.	6.350.000,00
E Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Rp.	66.520.000,00
3. Pembinaan PKK	Rp.	10.767.500,00
III BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT NAGARI : Rp. 164.261.500,00		
Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Rp	95.040.000,00
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Rp.	47.512.500,00
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Rp.	21.709.000,00
IV BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
1. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan :		204.726.000,00
- Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Rp.	56.542.000,00
- Peningkatan Produksi Pertenakan	Rp.	148.184.000,00
2. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kepala Desa		
- Peningkatan Kapasitas Wali Nagari	Rp.	7.300.000,00
3. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga :		
- Pelatihan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Rp.	52.767.500,00
4. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Rp.	10.000.000,00
- Pembentukan BUM Desa	Rp.	5.000.000,00
- Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	Rp.	5.000.000,00
V BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK NAGARI :		
Sub Bidang Penanggulangan Bencana :	Rp	154.000.000,00
- Sub Bidang Keadaan Darurat	Rp	10.000.000,00
- Sub Bidang Keadaan Mendesak	Rp	144.000.000,00

VI. PEMBIAYAAN

Pada Rancangan APB Nagari Painan Tahun Anggaran 2024 di anggarkan Pendapatan sebesar **Rp. 1.634.270.266,00** dan Belanja **sebesar Rp. 1.694.979.545,48** sehingga terjadi Defisit anggaran sebesar Rp. (60.709.297,48.-) selanjutnya, juga dianggarkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2023, pada pos Penerimaan Pembiayaan sebesar **Rp. 160.709.297,48.-** sehingga pendapatan sudah balance dengan belanja. Untuk seluruh kegiatan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini yaitunya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2024, dan berdasarkan kebutuhan serta kemampuan keuangan Nagari Painan

**TIM EVALUASI DAN VERIFIKASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAHAN NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TANDA TANGAN	
1	2	3	4	5	
1.	FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP NIP. 19850612 200412 2 001	Camat	Ketua	1.	
2.	ZUL IRFAN HARUN, S.STP NIP. 19910731 201206 1 001	Sekretaris Camat	Sekretaris		2.
3.	LISMAWATI, SE NIP. 19791009 200701 2 002	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian	Anggota	3.	
4.	ZULMADENTI, S.Ag NIP. 19780310 2008-1 2 028	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota		4.
5.	DILLA PERMATA PUTRI, A.Md NIP. 19850922 201101 015	Kasubag Perencanaan Pelaporan Keuangan	Anggota	5.	
6.	SUMIYAR DERITA S.AP NIP. 19720111 200312 2 002	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota		6.
7.	YUDIA MURTA, S. Pdi	Pendamping Desa	Anggota	7.	
8.	YULAFNIDA, S.Pd	Pendamping Desa	Anggota		8.
9.	DODI ERMANTO, SP	Pendamping Desa	Anggota	9.	

CAMAT IV JURAI



FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP.
Penata Tk.I/ (III/d)
Nip. 198506122004122001